

## SISTEM SOSIAL DAN PRASYARAT FUNGSIONAL KELESTARIAN SISTEM MASYARAKAT DESA PENYANGGA TAMAN NASIONAL MERU BETIRI

Diah Puspaningrum<sup>(1)</sup>, Ati Kusmiati<sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup>Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember

<sup>(2)</sup> Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember

<sup>(1)</sup> email: [puspafauzan38@gmail.com](mailto:puspafauzan38@gmail.com)

<sup>(2)</sup> email: [ati.faperta@unej.ac.id](mailto:ati.faperta@unej.ac.id)

### PENDAHULUAN

Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) merupakan 1 dari 51 Taman Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Selain berfungsi sebagai pendukung sistem penyangga kehidupan, kawasan konservasi juga berperan sebagai sarana pendukung penelitian, pengetahuan, dan pendidikan serta menunjang budidaya pertanian, rekreasi, dan pariwisata alam. Pengelolaan kawasan konservasi, utamanya yang berbatasan dengan pemukiman penduduk (daerah penyangga kawasan konservasi), hingga kini belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini disebabkan berbagai faktor, diantaranya: sumber daya pengelola terbatas dan interaksi dan intervensi kegiatan manusia yang mengganggu keutuhan dan kelestarian kawasan. Selain itu terdapat interaksi eksploratif dan pemanfaatan ilegal sumber-sumber daya kawasan seperti: perambahan, penebangan pohon secara liar, pencurian hasil hutan, perburuan telah mengakibatkan terjadinya konflik dan permasalahan lingkungan yang serius dalam pengelolaan kawasan konservasi (Anonim, 2016).

Program pemberdayaan dari TN. Meru Betiri kepada masyarakat dilaksanakan melalui kelompok tani yang terdapat di Desa Wonoasri. Program pemberdayaan yang dilakukan pihak Taman Nasional maupun instansi pemerintah lainnya dilakukan dengan membentuk kelembagaan sebagai sarana menampung aspirasi dari masyarakat. Kelembagaan yang terdapat di Desa Wonoasri terdiri dari LMDHK, SPKP, kelompok tani Lembah Meru, dan Masyarakat Mitra Polisi Hutan (MMP). Peran kelembagaan merupakan kunci yang terpenting dalam keberhasilan suatu program pemberdayaan di Desa Wonoasri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem sosial masyarakat desa penyangga kawasan Taman Nasional Meru Betiri dan prasyarat fungsional kelestarian sistem sosialnya sehingga pembentukan kelembagaan sosial oleh Taman Nasional Meru Betiri dapat mencapai sasaran dan tujuan sistem serta sarana yang perlu untuk mencapai tujuannya.

### METODOLOGI

#### Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena hendak mengetahui sistem sosial dan persyaratan fungsional masyarakat desa penyangga di kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Pembentukan kelembagaan di masyarakat desa hutan (komunitas lokal) belum diiringi dengan pemberian kuasa dan wewenang sehingga mereka mampu meningkatkan kemandirian.

#### Lokasi Penelitian



Metode penentuan daerah penelitian dilakukan secara *purposive methods* (metode secara sengaja) yaitu di kawasan Taman Nasional Meru Betiri Jawa Timur. Lembaga ini masuk dalam Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Departemen Kehutanan yang melakukan program *sosial forestry*.

### **Sumber Data Penelitian**

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan dari *key informant/stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Hutan dan ekosistem di kawasan Taman Nasional Meru Betiri Jawa Timur (data primer) yaitu berasal dari: Taman Nasional Meru Betiri (Powerholder), kelembagaan yang terlibat langsung: SPKP (Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan), Ketan Merah (Kelompok Tani Mitra Rehabilitasi), Jaketresi (Jaringan Kelompok Tani Mitra Rehabilitasi) dan Kelompok Peternak Lembah Meru di Taman Nasional Meru Betiri (TNMB). Menurut Bungin (2003) Pemilihan informan kunci (*key informant*) dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*) yaitu orang-orang yang mengetahui dan memahami masalah-masalah pemberdayaan yang dilakukan terhadap organisasi komunitas.

Data primer yang dikumpulkan terkait dengan penggalian informasi dengan melalui wawancara mendalam (*in depth interview*) sedangkan data sekunder didapat dari sumber tertulis, foto, dokumentasi yang diperoleh dari berbagai instansi dan lembaga yang terkait dalam pengelolaan hutan di Taman Nasional Meru Betiri.

### **Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data diperoleh secara primer dari hasil observasi, wawancara mendalam (*indepth interview*), dan metode RRA (*Rapid Rural Appraisal*) untuk meneliti akses dan control sumberdaya hutan, sumber kekuasaan dan sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat desa hutan.

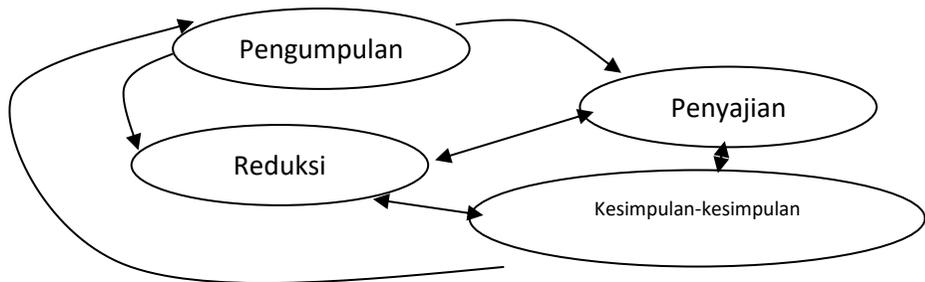
### **Validitas Data**

Sebagai penguji keabsahan data melalui triangulasi baik teknik, sumber dan teori. Triangulasi sumber yaitu mengumpulkan data sejenis dari sumber berbeda, triangulasi metode, yakni mengumpulkan data yang sejenis dengan menggunakan teknik atau pengumpulan data yang berbeda, serta triangulasi teori untuk menginterpretasikan data yang sejenis yang berbeda (Aman, 2011). Sedangkan menurut Miles dan Hubberman (1992:453) untuk menjamin validitas data yang akan dikumpulkan dalam penelitian dapat juga digunakan teknik informan review atau umpan balik dari informan.

### **Metode Analisis Data**

Analisis data menggunakan model interaktif. Langkah-langkah analisis data mulai dilakukan dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis data dilakukan secara berulang dan berlangsung secara simultan sampai ditemukan kesimpulan yang tepat, yang tidak terdapat kasus negatif yang menyanggah, terlihat mata rantai proses analisis secara utuh dan logis, dan diakui kebenarannya oleh informan.

Berdasarkan uraian diatas, langkah analisis data dengan pendekatan ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar. Analisis Data Model Interaktif dari Miles dan Huberman (1992)**

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Damsar dan Indrayani (2016) Unsur penting yang menjadi fokus perhatian dalam membahas sistem sosial budaya masyarakat pedesaan yaitu gagasan, nilai dan norma yang dipelajari, dialami dan dibangun bersama secara sosial. Sedangkan sistem sosial budaya yang dimiliki oleh masyarakat Desa Wonoasri sebagai desa penyangga konservasi adalah sebagai berikut:

### 1. Gagasan

Gagasan yang dimiliki oleh Ditjen PHKA terkait daerah penyangga yaitu daerah penyangga mempunyai fungsi untuk menjaga kawasan konservasi dari segala bentuk gangguan yang berasal dari luar atau dalam kawasan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan dan fungsi kawasan. LAKIP Ditjen PHKA tahun 2014 menyebutkan bahwa ada 3.746 desa di daerah penyangga sekitar kawasan konservasi. Aktivitas masyarakat di desa-desa tersebut dapat berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap kawasan konservasi.

Berdasarkan gagasan yang dimiliki baik oleh otoritas kehutanan dalam hal ini Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE) yaitu salah satu upaya mengurangi tekanan masyarakat terhadap kawasan konservasi adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah penyangga melalui pembinaan/pemberdayaan masyarakat. Sejak awal tahun 1980-an Pemerintah telah melakukan pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga kawasan konservasi. Sedangkan dari sisi masyarakat desa penyangga kawasan konservasi juga menginginkan peningkatan perekonomiannya dengan turut menjaga kawasan konservasi melalui pengelolaan lahan rehabilitasi.

### 2. Nilai

Nilai adalah gagasan mengenai apakah suatu pengalaman berarti, berharga, bernilai dan pantas atau tidak berarti, tidak berharga, tidak bernilai dan tidak pantas. Nilai berkaitan dengan ide yang dimiliki secara bersama tentang sesuatu itu baik atau buruk, diharapkan atau tidak diharapkan.

Nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat pedesaan banyak tapi yang relevan dengan penelitian ini adalah kepercayaan dan resiprositas dan norma yang dimiliki oleh masyarakat Desa Wonoasri sebagai berikut:

a. **Kepercayaan (*Trust*)**

Menyimpulkan inti konsep kepercayaan adalah: i) hubungan sosial antara dua orang atau lebih. Termasuk dalam hubungan ini adalah institusi, yang dalam pengertian ini diwakili orang; ii) harapan yang terkandung dalam hubungan itu, yang kalau direalisasi tidak akan merugikan salah satu atau kedua belah pihak; iii) interaksi yang memungkinkan hubungan dan harapan itu berwujud.

Berdasarkan definisi diatas dapat dikatakan bahwa *trust* atau kepercayaan merupakan modal sosial yang utama yang menjamin terwujudnya dan berlangsungnya suatu sistem sosial dalam masyarakat. Di bawah ini adalah ungkapan yang dikemukakan oleh Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) yang menggambarkan *trust* yang ada dalam masyarakat Desa Wonoasri.

Dari ungkapan tersebut dapat digambarkan bahwa sulit untuk mengembalikan *trust* kepada lembaga apabila *trust* tersebut telah dirusak oleh oknum pada masa lalu. Hal ini merupakan tantangan untuk berbagai pihak agar *trust* yang dimiliki masyarakat dapat pulih sehingga dapat meningkatkan keberhasilan pemberdayaan yang dilakukan.

b. **Resiprositas**

Resiprositas menunjuk pada gerakan diantara kelompok-kelompok simetris yang saling berhubungan. Ini terjadi apabila hubungan timbal balik antar individu atau antar kelompok sering dilakukan. Hubungan bersifat simetris terjadi apabila hubungan antara berbagai pihak (diantara individu dan individu, individu dan kelompok, serta kelompok dan kelompok) memiliki posisi dan peranan yang relatif sama dalam suatu proses pertukaran.

Suatu sistem bertahan apabila semua unsur pembentuk memperoleh untung atau minimal tidak mendapatkan kerugian. Keuntungan tidak selalu bersifat ekstrinsik tetapi juga bisa bersifat intrinsik. Jika ada bagian atau unsur pembentuk sistem mengalami kerugian, maka diperkirakan sistem tidak bisa terbentuk atau apabila sistem telah ada, maka bisa jadi sistem akan bubar.

Dari uraian mengenai resiprositas yang terjadi antara berbagai lembaga yang terdapat di Desa Wonoasri dapat disimpulkan bahwa Lembaga yang memiliki resiprositas langsung dengan Taman Nasional Meru Betiri adalah lembaga LMDHK, Ketan Merah, MMP dan SPKP sedangkan lembaga yang tidak memiliki resiprositas langsung dengan Taman Nasional Meru Betiri adalah Kelompok Peternak Lembah Meru. Menunjuk pada uraian diatas dapat dilihat bahwa resiprositas yang terjadi antara Taman Nasional Meru Betiri dengan lembaga-lembaga tersebut belum bersifat simetris karena hubungan antara berbagai pihak (diantara individu dan individu, individu dan kelompok, serta kelompok dan kelompok) belum memiliki posisi dan peranan yang relatif sama dalam suatu proses pertukaran. Peranan dominan dalam proses pemberdayaan masih dilakukan oleh Taman Nasional Meru Betiri dan lembaga-lembaga pemerintah dalam rangka melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat.

### 3. Norma

Norma, sebagai sumberdaya sosial, dipahami sebagai aturan main yang menuntun perilaku seseorang. Norma yang terdapat dalam masyarakat Desa Wonoasri dalam mengelola lahan rehabilitasi menurut petugas Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) adalah sebagai berikut:

*“Taman Nasional memiliki aturan main yaitu ibarat “bidadari cantik” dimana tidak bisa disentuh hanya bisa dilihat. Tetapi masyarakat desa hutan terutama petani yang menjadi anggota kelompok mitra rehabilitasi menganggap bahwa lahan rehap merupakan hak garap yang bisa menjadi milik sendiri/diganti/disewa atau dengan kata lain menjadi “hak milik”. Saat ini mulai dilakukan pemilihan penggarap lahan rehap “diseleksi”. Dipilih siapa yang bisa mengerjakan lahan rehap (selektif).*

Menurut narasumber saat ini upaya yang dilakukan Taman Nasional “kurang jitu” karena banyak pelanggaran dan sanksi yang diberikan kurang tegas. Perlu “di dog” (red: diputuskan) adanya perjanjian kerjasama antara petani dan TNMB yang memiliki kekuatan hukum sehingga apabila melakukan pelanggaran maka tidak bisa mengelak karena ada dokumen yang resmi sehingga TNMB juga dapat memberikan sanksi yang jelas. Ada Kesan TNMB masih sangat longgar dalam menerapkan aturan. Mestinya petani yang menggarap lahan rehap harus diberi batasan yang jelas berapa tahun tanaman pokok harus hidup dan apabila dilanggar harus keluar dari lahan rehabilitasi. Hal ini merupakan strategi yang jitu sehingga tujuan konservasi bisa berhasil.

#### **Prasyarat Fungsional Kelestarian Sistem Masyarakat Desa Penyangga**

Menurut Parsons (dalam Poloma, 2004) ada dua dimensi dalam analisis sistem yang hidup. 1) adanya saling kaitan bagian-bagian yang merupakan sistem, 2) mencakup pertukaran sistem dengan lingkungannya. Ciri-ciri umum yang ada dalam seluruh sistem yang hidup adalah prasyarat atau *functional imperative*.

Menurut Parsons terdapat fungsi-fungsi atau kebutuhan-kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi oleh sistem yang hidup demi kelestariannya. Dua pokok penting yang termasuk dalam kebutuhan fungsional adalah: (1) yang berhubungan dengan kebutuhan sistem internal atau kebutuhan sistem internal atau kebutuhan sistem ketika berhubungan dengan lingkungannya dan (2) yang berhubungan dengan pencapaian sasaran dan tujuan sistem serta sarana yang perlu untuk mencapai tujuan itu. Berdasarkan premis itu secara deduktif Parsons menciptakan empat kebutuhan fungsional yaitu: 1) *Latent Pattern Maintenance* (L) menunjuk pada masalah bagaimana menjamin kesinambungan tindakan dalam sistem sesuai dengan beberapa aturan atau norma-norma ; 2) *Integration* (I) yaitu koordinasi kesesuaian bagian-bagian dari sistem sehingga seluruhnya fungsional; 3) *Goal Attainment* (G) adalah masalah pemenuhan tujuan sistem dan prioritas diantara tujuan-tujuan itu dan; 4) *Adaptation* (A) menunjuk pada kemampuan sistem menjamin apa yang dibutuhkannya dari lingkungan serta mendistribusikan sumber-sumber tersebut ke dalam seluruh sistem.

Untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat, maka tatanan sosial yang ada harus tetap berlaku dari generasi ke generasi. Oleh karenanya sistem tatanan sosial yang ada perlu ditanamkan pada setiap individu anggota masyarakat. Dengan kata lain, setiap masyarakat perlu melaksanakan sosialisasi sistem sosial yang dimiliki. Sosialisasi adalah proses transfer

nilai dan norma sosial kepada individu warga masyarakat sehingga nilai dan norma yang benar dapat ditanamkan ke dalam keyakinan tiap-tiap individu warga masyarakat (Narwoko dan Suyanto, 2004).

Sebenarnya proses sosialisasi telah dilakukan oleh pihak Taman Nasional Meru Betiri mengenai aturan-aturan konservasi yaitu larangan dalam eksplorasi dan pemanfaatan ilegal sumber-sumber daya kawasan seperti: perambahan, penebangan pohon secara liar, pencurian hasil hutan, perburuan dalam kawasan hutan konservasi. Hal ini diungkapkan oleh Ketua SPKP sebagai berikut:

*Penyebaran informasi tersebut melalui pertemuan kelompok dan diteruskan melalui pengurus kelompok. Terdapat sanksi yang diberlakukan terhadap siapapun yang melanggar aturan konservasi, baik sanksi ringan sampai berat atau sampai menempuh jalur hukum. Kelompok hanya mengetahui pengetahuan umum mengenai peraturan dari TNMB dikarenakan pembekalan SPKP masih belum matang sehingga belum menguasai tentang hal tersebut lebih banyak. Sejauh ini saya sebagai ketua kelompok hanya melakukan himbauan saja kepada anggotanya untuk mentaati aturan konservasi.*

Proses sosialisasi pada dasarnya bertujuan mengintegrasikan sistem personal dan sistem kultural kedalam sistem sosial. Dengan demikian akan terdapat komitmen dari para individu kepada tatanan, nilai-nilai dan norma-norma yang di masyarakat. Persoalannya bagaimana sistem personal diintegrasikan ke dalam sistem sosial? Menurut Parsons ada dua mekanisme sosialisasi dan mekanisme kontrol sosial. Menurut Parsons, mekanisme sosialisasi merupakan alat dan dengan mana pola kultural seperti nilai, “*beliefs*”, bahasa dan lain-lain simbol ditanamkan pada sistem personal. Dengan proses ini maka anggota masyarakat akan menerima dan memiliki komitmen terhadap norma-norma yang ada. Mekanisme kontrol mencakup suatu proses dimana status dan peran yang ada di masyarakat diorganisir ke dalam sistem sosial, sehingga perbedaan-perbedaan dan ketegangan-ketegangan yang ada di masyarakat dapat ditekan. Mekanisme kontrol ini meliputi, antara lain: a) pelembagaan, b) sanksi-sanksi, c) aktivitas ritual, d) penyelamatan pada keadaan yang kritis dan tidak normal. e) pengintegrasian kembali agar keseimbangan dapat dicapai kembali, dan f) pelembagaan kekuasaan untuk melaksanakan tatanan sosial. Adanya mekanisme integrasi ketiga sistem tersebut akan menjaga keseimbangan sistem sosial yang ada (Zamroni, 1992). Sistem kultural melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan aktor seperangkat norma dan nilai yang memotivasi mereka bertindak. Persyaratan kunci bagi terpeliharanya nilai di dalam sistem adalah proses internalisasi dan sosialisasi. Dalam proses sosialisasi yang berhasil, norma dan nilai itu diinternalisasikan (*internalized*), artinya norma dan nilai menjadi bagian dari “kesadaran” aktor. Akibatnya dalam mengejar kepentingan mereka sendiri, aktor sebenarnya mengabdikan pada kepentingan sistem sebagai satu kesatuan (Ritzer dan Goodman, 2007). Internalisasi adalah sebuah proses yang dikerjakan oleh pihak yang tengah menerima proses sosialisasi. Proses ini bukanlah proses pasif, melainkan merupakan rangkaian aktivitas psikologik yang aktif sifatnya. Pertama-tama dia aktif menginterpretasi makna dari apa-apa yang disampaikan kepadanya (yaitu dalam hal sosialisasi diselenggarakan secara formal), atau makna dari apa-apa yang dia saksikan atau hayati (yaitu di dalam hal sosialisasi diselenggarakan secara informal dan tak sengaja). Pada langkah berikutnya dia aktif

meresapkan dan mengorganisir hasil interpretasinya itu ke dalam ingatan, perasaan dan batinnya (Narwoko dan Suyanto, 2004).

Sistem sosial menanggulangi fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Upaya pembentukan sistem sosial dalam menjalankan tujuan fungsi integrasi yang telah dilakukan oleh Taman Nasional Meru Betiri dalam menjaga kawasan hutan konservasi dari berbagai macam gangguan disampaikan oleh key informant dari Lembaga Lembah Meru adalah sebagai berikut:

*Saya menjalankan aturan seperti larangan-larangan untuk mengambil flora dan fauna hutan karena hal tersebut dapat berdampak pada kelangsungan hidup generasi selanjutnya. Selain itu larangan tersebut merupakan peraturan yang disahkan oleh negara dan akan ada sanksi jika melanggarnya. Pihak taman nasional memberikan serangkaian ajaran seperti penyuluhan mengenai larangan-larangan yang ada dan pemberdayaan ekonomi sesuai dengan bidang yang dijalankan oleh kelompok lembah meru.*

Berdasarkan pernyataan key informant diatas bahwa fungsi integrasi sudah dilakukan oleh Taman Nasional terhadap masyarakat desa penyangga kawasan konservasi dengan memberikan serangkaian ajaran dan penyuluhan mengenai larangan-larangan yang ada dalam kawasan konservasi. Tetapi faktanya masih saja terjadi pelanggaran pencurian dan perambahan di kawasan hutan konservasi. Jadi sistem sosial masyarakat daerah penyangga yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya harus dilaksanakan lebih intens melalui kegiatan sosialisasi dalam kelompok sosial dalam hal ini masing-masing keluarga dalam masyarakat desa penyangga. Sehingga proses pembentukan kepribadian melalui proses internalisasi lebih efektif diketahui, dipahami, dihayati sampai dilaksanakan oleh generasi muda dalam berinteraksi dengan kawasan interaksi sehingga kelestarian sumberdaya alam hutan dan ekosistem di kawasan Taman Nasional Meru Betiri dapat terjaga.

Dari berbagai teori yang telah dikemukakan diatas bahwa telah terdapat upaya-upaya dalam melestarikan sistem sosial masyarakat desa penyangga kawasan konservasi hutan Taman Nasional Meru Betiri dengan menjalankan fungsi-fungsi *Latent maintenance (L)*, *Integrasi (I)*, *Goal Attainment (G)*, dan *Adaptation*.

Struktur sistem sosial dipertahankan oleh *Latent Maintenance (L)* dengan melakukan *fiduciary system* dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat desa penyangga melalui lembaga-lembaga sosial dalam menjaga kawasan konservasi. Fungsi adaptasi dalam menjalankan fungsi ekonomi dilakukan dengan melakukan berbagai upaya pemberdayaan dengan memberikan berbagai pelatihan kepada masyarakat desa penyangga melalui lembaga-lembaga yang telah dibentuk oleh Taman Nasional Meru Betiri. Lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan penyangga sehingga tidak mengganggu kawasan hutan konservasi Taman Nasional Meru Betiri. Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*) dilakukan dengan fungsi politik dengan tetap mempertahankan kekuasaan dalam menjaga keamanan tetap dalam wewenang taman Nasional Meru Betiri walaupun lembaga juga diberi wewenang dalam pelaksanaan pencapaian tujuan dalam bidang ekonomi melalui pembentukan badan usaha badan usaha yang dijalankan oleh lembaga-lembaga sosial yang ada (LMDHK, SPKP, Ketan Merah).

### KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Wonoasri sebagai desa penyangga kawasan Taman Nasional Meru Betiri merupakan sistem sosial yang terdiri dari berbagai lembaga baik dibentuk secara langsung oleh Taman Nasional Meru Betiri yaitu Lembaga Desa Hutan Konservasi (LMDHK), Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP), Kelompok Tani Mitra Rehabilitasi (Ketan Merah) dan Masyarakat Mitra Polhut (MMP).
2. Terdapat upaya-upaya dalam melestarikan sistem sosial masyarakat desa penyangga kawasan konservasi hutan Taman Nasional Meru Betiri dengan menjalankan fungsi-fungsi *Latent maintenance* (L), *Integrasi* (I), *Goal Attainment* (G), dan *Adaptation*. Struktur sistem sosial dipertahankan oleh *Latent Maintenance* (L) dengan melakukan *fiduciary system* dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat desa penyangga melalui lembaga-lembaga sosial dalam menjaga kawasan konservasi. Fungsi adaptasi dalam menjalankan fungsi ekonomi dilakukan dengan berbagai upaya pemberdayaan dengan memberikan berbagai pelatihan kepada masyarakat desa penyangga melalui lembaga-lembaga yang telah dibentuk oleh Taman Nasional Meru Betiri. Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*) dilakukan dengan fungsi politik dengan tetap mempertahankan kekuasaan dalam menjaga keamanan dalam wewenang taman Nasional Meru Betiri.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2015. Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembinaan Desa Binaan Di Daerah Penyangga Kawasan Konservasi. Direktorat Kawasan Konservasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta
- Anonim. 2016. Laporan Kegiatan Identifikasi Potensi Desa Binaan Taman Nasional Meru Betiri (Desa Wonoasri). Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Balai Taman Nasional Meru Betiri. Jember
- Aman. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Disampaikan dalam Acara Pengabdian Kepada Masyarakat di Islam Gamping Sleman, 29 Juli 2011
- Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Damsar dan Indrayani, 2016. Pengantar Sosiologi Perdesaan. Kencana. Jakarta
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. Analisa Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Universitas Indonesia. Jakarta
- Poloma, Margareth M. 2004. Sosiologi Kontemporer. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Narwoko, J Dwi dan Suyanto, Bagong. 2004. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. Kencana. Jakarta
- Ranjabar, Jacobus. 2014. Sistem Sosial Budaya Indonesia Suatu Pengantar. Alfabeta. Bandung
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. 2007. Teori Sosiologi Modern. Kencana. Jakarta
- Zamroni. 1992. Pengantar Pengembangan Teori Sosial. Tiara Wacana. Yogyakarta